Jurnal **Masyarakat Indonesia**, Volume 50 No. 2 Tahun 2024
journal homepage: https://ejournal.brin.go.id/jmi

SENTIMEN POSITIF ATAU NEGATIF: PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

POSITIVE OR NEGATIVE SENTIMENT: PUBLIC PERSPECTIVES ON THE RELOCATION OF THE NATIONAL CAPITAL

Ahmad Yusuf, Ahmad Rizani, Rahimi Fitri,
Kun Nursyaiful Priyo Pamungkas, Wanvy Arifha Saputra

Politeknik Negeri Banjarmasin
Syahrial Shaddiq
Universitas Lambung Mangkurat
ahmadyusuf@poliban.ac.id

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital (IKN) to East Kalimantan is a strategic move aimed at addressing Jakarta's infrastructure challenges and promoting more balanced development across Indonesia. This study examines the sentiments of local and national communities regarding the IKN relocation project, with a focus on its social, economic, and environmental impacts. The study employs sentiment analysis from social media, news reports, and related publications to identify public opinions. The findings reveal that positive sentiments are focused around hopes for local economic development and improved infrastructure, while negative sentiments reflect concerns about displacement, environmental damage, and the lack of public participation in decision-making. This study emphasizes the importance of active community involvement, transparency, and environmental protection in the development process to ensure that the benefits of the IKN project are equitably distributed. These findings offer valuable insights to policymakers in understanding public opinion dynamics related to national development policies in Indonesia.

Keywords: *IKN, perspectives, sentiment analysis*

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Studi ini mengkaji sentimen masyarakat lokal dan nasional terkait proyek pemindahan IKN, dengan fokus pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan analisis sentimen dari media sosial, laporan berita, serta publikasi terkait untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sentimen positif mencakup harapan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan infrastruktur, sedangkan sentimen negatif mencakup kekhawatiran terkait penggusuran, kerusakan lingkungan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal, transparansi, dan perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan IKN agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk mendukung keberlanjutan di masa mendatang bagi pengambil keputusan dalam memahami dinamika opini masyarakat terkait kebijakan pembangunan nasional di Indonesia.

Kata Kunci: analisis sentiment, IKN, perspektif

PENDAHULUAN

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia telah menjadi topik yang menarik bagi masyarakat sejak lama. Usulan pertama muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang mengusulkan Palangka Raya di Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru, namun terhambat oleh masalah politik. Pada tahun 1997, di era Presiden Soeharto, rencana serupa muncul dengan Jonggol di Jawa Barat sebagai calon ibu kota, tetapi krisis moneter menghalanginya. Di tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengusulkan pemindahan pusat

DOI: 10.55981/jmi.2024.8842
Naskah Masuk: 2 Mei 2024 Revisi akhir: 1 Juli 2024 Diterima: 4 Agustus 2024

ISSN 0125-9989 (print) | e-ISSN 2502-5694 (online) | © 2024 The Author (s). Published by Penerbit BRIN. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

pemerintahan ke luar DKI Jakarta, tetapi belum terealisasi. Akhirnya, di masa Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, rencana pemindahan ini mendapat momentum, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021). Rencana pemindahan ibu kota dimulai dengan peninjauan landasan hukum. Pada 29 September 2021, Presiden RI mengirim surat kepada DPR RI mengenai wacana pemindahan ibu kota. DPR RI merespons dengan membentuk panitia khusus untuk merancang undang-undang terkait. Pada awal tahun 2022, DPR melakukan studi banding ke Kazakhstan untuk mempelajari kompleksitas pemindahan ibu kota. Pada 18 Januari 2022, rancangan awal undang-undang Ibu Kota Negara diterbitkan dan terus disempurnakan. Akhirnya, pada 15 Februari 2022, DPR RI mengesahkan dan meratifikasi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Kamal, 2022). Lini masa pembentukan landasan hukum ini disajikan pada Gambar 1.

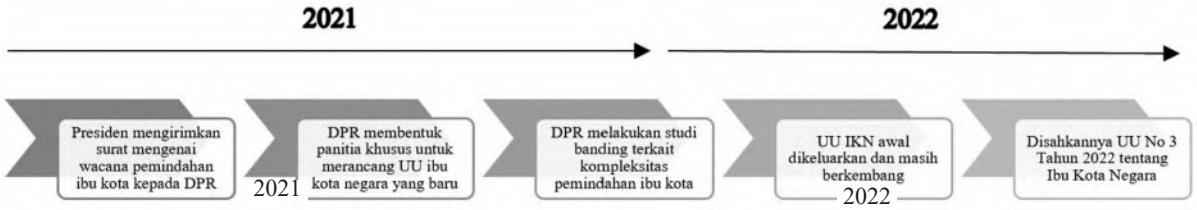

Gambar 1. Lini masa pembentukan landasan hukum pemindahan ibu kota baru

Meskipun pemindahan IKN menjadi kebijakan strategis, prosesnya tidak lepas dari kritik seperti studi yang dilakukan oleh Farhan dkk (2022) yang menyatakan bahwa landasan hukum (UU Nomor 3 Tahun 2022) yang menjadi dasar pemindahan ibu kota dibentuk sangat cepat. Bahkan, UU ini dianggap sebagai landasan hukum tercepat dari aspek perancangan, pengesahan, hingga ratifikasi sepanjang sejarah legislatif di Indonesia (W. R. Jati, 2022; Musu dkk., 2022). Padahal, jika mempertimbangkan kedalaman, kepentingan, hingga kerumitan aspek yang dibahas diperlukan waktu yang lama dalam pembentukan UU. Mengungkapkan bahwa proses pembentukan UU dalam waktu yang cepat mengakibatkan beberapa hal seperti tinjauan naskah akademik yang belum matang, belum menggambarkan lingkungan adat istiadat, manfaat bagi masyarakat, serta keberpihakan ekonomi. Menurut Syaban & Appiah-Opoku (2023) pemindahan ibu kota harus melalui beberapa prosedur seperti penyusunan naskah akademik harus komprehensif, melakukan penelitian yang mendalam pada berbagai aspek, penentuan lokasi ibu kota harus berdasarkan pada kajian penelitian, standar dalam proses pembentukan UU, dan partisipasi publik. Sementara itu, pemindahan ibu kota di negara berkembang sering kali menghadapi tantangan, seperti konflik dalam penentuan lokasi, serta faktor budaya, demografi, ekonomi, dan politik. Menurut Biswas dkk (2019) ada lima aspek utama yang harus dipenuhi dalam pemindahan ibu kota: akuntabilitas, transparansi, efektivitas, kesetaraan, dan partisipasi. Akuntabilitas mencakup keterlibatan lembaga keuangan, audit yang sistematis, serta publikasi proses seperti kontrak dan anggaran. Transparansi mengacu pada keterbukaan terkait struktur, regulasi, dan standar pembangunan. Efektivitas berhubungan dengan peran pemerintah dalam memastikan pemindahan ibu kota sesuai jadwal. Kesetaraan mengutamakan pemerataan ekonomi, sementara partisipasi menekankan keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Selain itu, salah satu isu utama adalah kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya transparansi mengenai dampak dan manfaat proyek ini bagi masyarakat lokal (Rifaid dkk., 2023). Hal ini terbukti dari beberapa survei yang telah dilakukan seperti voting yang dilakukan oleh Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (2019)

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung rencana pemindahan ibu kota. Namun, masih ada sebagian yang menolak karena merasa bahwa persiapannya belum matang dan keputusan diambil terlalu cepat. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah kurang transparan dalam proses ini. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan terbuka terhadap opini publik sebelum memutuskan pemindahan, yang dianggap penting untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Netray juga melakukan dua survei melalui portal berita. Survei pertama pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 62 persen, tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Alasan utama yang dikemukakan adalah pemborosan anggaran, lokasi yang kurang strategis, potensi peningkatan utang negara, serta masalah lain yang dianggap lebih mendesak, seperti kemiskinan dan pemerataan ekonomi (Trilatifah, 2022). Namun, hasil survei kedua pada pertengahan tahun 2023 menunjukkan pergeseran, di mana lebih banyak masyarakat memberikan tanggapan positif. Informasi mengenai pemindahan ibu kota muncul secara intens setiap hari, dan banyak tanggapan positif berkaitan dengan peresmian logo IKN serta peluang investasi bagi para investor (Tia, 2023).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik dari perspektif sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti kepadatan penduduk dan kemacetan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pemahaman yang mendalam terhadap respons masyarakat, terutama masyarakat lokal yang akan terdampak langsung, sangat penting untuk mengevaluasi dampak sosial dari pemindahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sentimen masyarakat terbagi, serta apa saja faktor yang mempengaruhi pandangan positif dan negatif terhadap pemindahan IKN. Dalam perkembangan terkini, analisis sentimen menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dalam mengevaluasi opini publik di media sosial, terutama terkait kebijakan besar seperti pemindahan IKN. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data secara *real-time* dari berbagai lapisan masyarakat, memberikan wawasan langsung mengenai pandangan mereka. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa analisis sentimen mampu memberikan pemahaman penting mengenai opini masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur besar, serta membantu pengambil keputusan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat dan responsif (Hartmann dkk., 2023; Mao dkk., 2024; Rodríguez-Ibánez dkk., 2023; Subramanian dkk., 2021).

Meskipun banyak kajian telah dilakukan terkait pemindahan ibu kota, masih sangat sedikit yang menggunakan pendekatan analisis sentimen untuk mengevaluasi pandangan masyarakat, khususnya dari masyarakat lokal di wilayah IKN. Analisis perspektif masyarakat terhadap pemindahan IKN menjadi penting untuk dipahami lebih lanjut. Studi ini mencakup ruang lingkup untuk menggali lebih dalam pandangan masyarakat terhadap pemindahan IKN, dengan mengeksplorasi aspek positif dan negatifnya menggunakan pendekatan analisis sentimen, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat merespons rencana pemindahan IKN. Kesenjangan ini penting untuk diatasi, mengingat pentingnya perspektif lokal dalam memahami dampak sosial dan ekonomi dari pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan pandangan yang lebih rinci tentang bagaimana masyarakat, terutama masyarakat lokal, merespons proyek ini. Penggunaan analisis sentimen media sosial mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami opini masyarakat terkait pemindahan ibu kota. Studi ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai pandangan masyarakat secara umum, tetapi juga secara khusus mengkaji sentimen dari perspektif masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam mempertimbangkan dampak sosial dari proyek ini, serta merancang langkah-langkah yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam konteks ini merujuk pada keterlibatan aktif mereka dalam perspektif publik melalui platform media sosial, khususnya Twitter. Data yang digunakan dalam studi ini menggambarkan bentuk partisipasi tersebut, di mana masyarakat memberikan opini mereka terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, atau yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan media sosial sebagai saluran untuk menyuarakan pandangan mereka tentang berbagai aspek pemindahan IKN.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perspektif positif dan negatif masyarakat mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, atau yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara, berdasarkan tanggapan di media sosial selama periode 1 Januari 2020 hingga 8 April 2024. Data yang dianalisis diambil dari media sosial Twitter menggunakan kata kunci "Ibu Kota Negara (IKN)". Twitter, yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat perkotaan, sering kali merefleksikan opini masyarakat urban yang memiliki akses lebih mudah ke teknologi digital. Oleh karena itu, data sentimen dalam studi ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan pandangan masyarakat lokal di sekitar wilayah IKN, yang mungkin memiliki akses terbatas ke platform ini. Studi ini mengidentifikasi 1.836 unggahan terkait Ibu Kota Negara (IKN) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Proses pembangunan dan pemindahan IKN masih berlangsung, dan masyarakat terus menyuarakan pandangan mereka melalui media sosial. Beragam topik diperbincangkan, memunculkan berbagai kata-kata populer yang sering digunakan saat membahas IKN seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Kata yang populer tentang IKN

Data dikumpulkan dan dianalisis melalui beberapa tahapan, termasuk pembersihan data, *pre-processing* (normalisasi, penghapusan stopwords, tokenisasi, dan *stemming*), serta pelabelan (klasifikasi). Seluruh proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Setelah semua langkah ini selesai, data dikategorikan menjadi dua yaitu sentimen positif dan negatif. Hasil dari analisis sentimen masyarakat mengenai IKN kemudian divisualisasikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik tanggapan positif dan negatif

Berdasarkan Gambar 3, data ditemukan bahwa tanggapan masyarakat dengan perspektif positif masih mendominasi di media sosial dibandingkan dengan perspektif negatif. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, seperti halnya kebijakan besar lainnya, memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan tanggapan positif, terutama mengenai peluang yang diharapkan dapat terbuka untuk perkembangan ekonomi. Meskipun demikian, tanggapan negatif juga muncul, mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai aspek terkait pemindahan IKN.

PROFIL DEMOGRAFIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Data sentimen yang digunakan dalam studi ini mencakup lokasi geografis dari pengguna Twitter yang terlibat dalam diskusi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pengguna dari berbagai pulau di Indonesia direpresentasikan dalam peta berikut, yang menunjukkan distribusi pengguna berdasarkan wilayah geografis

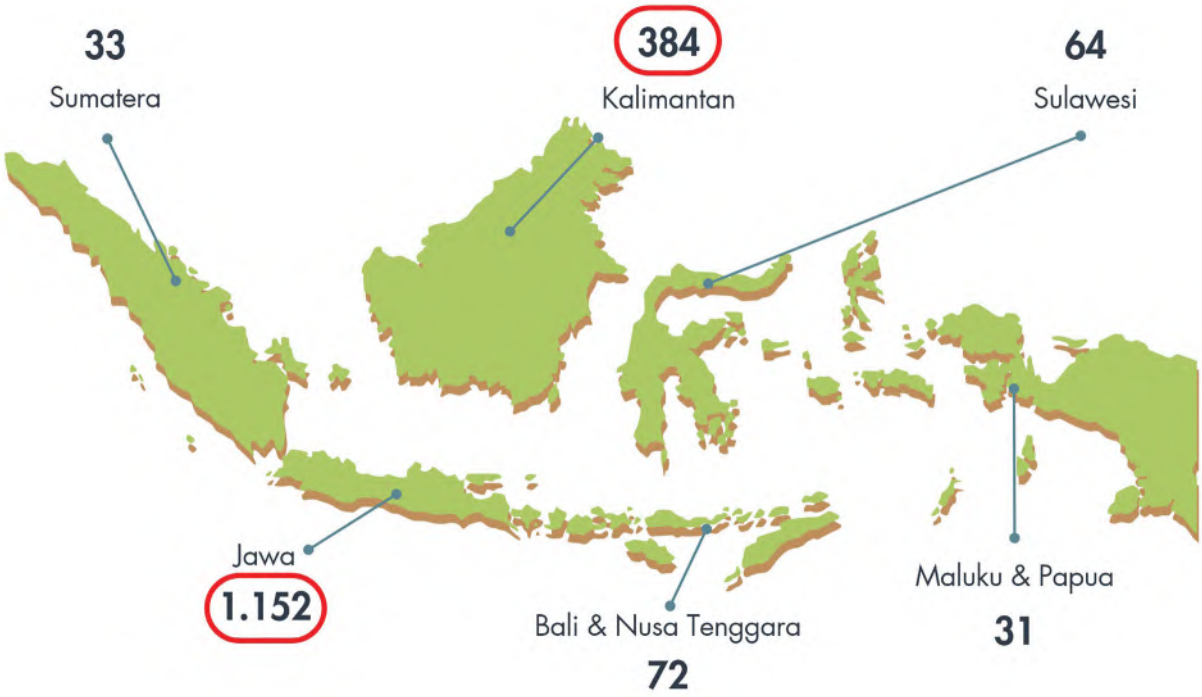

Gambar 4. Distribusi geografis partisipasi masyarakat

Berdasarkan Gambar 4, mayoritas pengguna Twitter yang membahas IKN berasal dari Pulau Jawa, dengan total 1.152 pengguna, sementara hanya 384 pengguna berasal dari Kalimantan, wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru. Meskipun partisipasi masyarakat Kalimantan ada, data ini menunjukkan dominasi perspektif dari Pulau Jawa. Jumlah pengguna dari Jawa lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Kalimantan, sehingga opini yang terwakili dalam data ini lebih mencerminkan pandangan masyarakat perkotaan di Jawa daripada masyarakat lokal yang terkena dampak langsung di Kalimantan. Hal ini mengindikasikan bahwa data Twitter mungkin lebih mewakili perspektif masyarakat yang memiliki akses teknologi lebih baik, terutama di kawasan urban.

Distribusi sentimen berdasarkan wilayah menunjukkan perbedaan pandangan antara masyarakat di Pulau Jawa dan Kalimantan. Tabel 1 merangkum sentimen positif dan negatif dari masing-masing wilayah.

Tabel 1. Distribusi sentimen positif dan negatif berdasarkan wilayah

Wilayah	Sentimen Positif (%)	Sentimen Negatif (%)
Jawa	60	40
Kalimantan	40	60
Sulawesi	55	45
Sumatera	50	50
Bali & Nusa Tenggara	57	43
Maluku & Papua	48	52

Pengguna dari Pulau Jawa cenderung lebih memberikan sentimen positif (60 persen) dibandingkan dengan Kalimantan, di mana 60 persen sentimen yang tercatat adalah negatif. Distribusi ini mencerminkan perbedaan persepsi antara masyarakat di wilayah yang terkena dampak langsung dari pemindahan ibu kota dan mereka yang berada di luar wilayah tersebut. Perbedaan signifikan dalam sentimen antara pengguna di Pulau Jawa dan Kalimantan dapat dihubungkan dengan kondisi sosial-ekonomi di masing-masing wilayah. Masyarakat di Jawa melihat pemindahan ibu kota sebagai solusi yang dapat mengurangi beban infrastruktur di Jakarta, sementara masyarakat di Kalimantan, yang berada di dekat lokasi pembangunan, lebih khawatir tentang dampak langsung seperti penggusuran, kerusakan lingkungan, dan perubahan sosial yang akan terjadi. Perbedaan signifikan ini memperlihatkan adanya kesenjangan pandangan antara masyarakat yang terkena dampak langsung dan mereka yang tinggal di wilayah lain.

Selain representasi geografis, analisis juga memperhatikan profil usia pengguna yang terlibat dalam diskusi ini. Mayoritas pengguna yang aktif membahas IKN di Twitter berasal dari kelompok usia 18–30 tahun (60 persen), yang cenderung lebih optimis terhadap peluang ekonomi yang mungkin muncul dari pemindahan ibu kota. Sebaliknya, kelompok usia di atas 45 tahun, meskipun lebih sedikit terwakili, menunjukkan sentimen negatif yang lebih tinggi. Kelompok usia yang lebih tua mungkin lebih skeptis terhadap proyek ini, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang akan terjadi. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kelompok usia 18–30 tahun lebih cenderung mendukung pemindahan IKN karena melihatnya sebagai peluang untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kelompok usia di atas 45 tahun menunjukkan kekhawatiran lebih besar terhadap dampak sosial dan lingkungan, yang mencerminkan pentingnya kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana proyek ini akan mempengaruhi berbagai segmen populasi.

Meskipun analisis ini memberikan wawasan awal tentang sentimen berdasarkan lokasi geografis dan usia, keterbatasan data yang hanya berasal dari Twitter membuat representasi pandangan masyarakat lebih terbatas pada mereka yang aktif di media sosial. Pengguna dari kelompok usia yang lebih tua dan masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya di Kalimantan, mungkin kurang terwakili karena akses mereka terhadap teknologi digital yang lebih terbatas. Penelitian di masa mendatang yang melibatkan survei langsung dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pandangan berbagai kelompok usia dan masyarakat di wilayah yang kurang terepresentasi.

TANTANGAN PEMINDAHAN IBU KOTA

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau Nusantara di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama sebagai proyek mega infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dibutuhkan anggaran sebesar 466 triliun Rupiah untuk menyelesaikan proyek ini hingga tahun 2045, dengan pendanaan awal sebesar 5,1 triliun Rupiah dari APBN pada tahun 2022. Meskipun digembar-gemborkan sebagai salah satu proyek terbesar di dunia, proyek ini masih menghadapi berbagai kendala yang belum sepenuhnya diatasi oleh regulasi yang ada.

Pemerintah menyoroti kebutuhan mendesak untuk memindahkan ibu kota karena keterbatasan lahan di Jakarta (Colven, 2020). Pertumbuhan penduduk dan fungsi pemerintahan yang semakin berkembang telah meningkatkan permintaan ruang di ibu kota. Namun, keterbatasan lahan di Jakarta menghambat efektivitas pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merancang pemindahan ibu kota ke Kalimantan di atas tanah milik negara, langkah strategis yang juga diharapkan dapat mencegah konflik lahan dan penyalahgunaan sumber daya.

Pemerintah telah mengambil langkah mitigasi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari pemindahan ibu kota, dengan tujuan memprioritaskan hak dan kesejahteraan penduduk lokal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyoroti pemindahan ibu kota ini sebagai solusi penting dalam mengatasi berbagai masalah di Jakarta, sekaligus sebagai strategi untuk mendorong keberlanjutan dan pembangunan yang lebih merata. Tabel 2 menyajikan urgensi dan tantangan pemindahan ibu kota di beberapa negara.

Tabel 2. Urgensi dan tantangan pemindahan ibu kota baru di berbagai negara

Negara	Ibu Kota Baru	Urgensi	Tantangan
Brazil	Brasilia	Kemacetan, keterbatasan lahan untuk pembangunan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi	Tantangan perencanaan kota, kesenjangan ekonomi, masalah lingkungan seperti penggundulan hutan, dan masalah penyesuaian politik dan budaya bagi penduduknya.
Kazakhstan	Astana	Kepadatan penduduk yang rendah dan keragaman budaya yang besar	Biaya tinggi, iklim yang buruk, memerlukan penyesuaian budaya dan sosial, serta memiliki masalah perencanaan kota
Nigeria	Abuja	Kemacetan, kelebihan penduduk, kesenjangan ekonomi yang tidak seimbang	Beban keuangan, menyebabkan perselisihan hak atas tanah karena menggusur penduduk setempat, pertumbuhan yang pesat, memerlukan penyesuaian budaya, dan masalah keamanan yang tidak terduga
Korea Selatan	Sejong	Fokus pada kegiatan administrasi pemerintahan	Prospek perjalanan berjam-jam setiap hari yang menimbulkan beban fisik dan finansial, serta mengganggu keseimbangan kehidupan kerja
Myanmar	Naypyidaw	Sebagai simbol kebesaran negara, aman dari angin topan, dan lokasi yang strategis	Tidak memiliki fasilitas komersial dan pendidikan yang memadai
Indonesia	**Nusantara**	**Ekonomi yang belum merata, kemacetan, hingga menyiapkan tantangan masa depan**	**Pendanaan pembangunan ibu kota baru, obsesi terhadap penampilan fisik kota dibandingkan masalah sosial ekonomi, dan minimnya partisipasi masyarakat**

Keputusan untuk memindahkan ibu kota di berbagai negara didorong oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan strategis. Beberapa negara telah mencapai keberhasilan dalam proses ini, sementara negara lainnya masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan utama yang sering muncul meliputi pendanaan, obsesi terhadap penampilan fisik kota dibandingkan masalah sosial, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (Abubakar & Doan, 2017; Syaban & Appiah-Opoku, 2023)Dodoma (Tanzania. Kurangnya partisipasi masyarakat sering kali menjadi penyebab kegagalan relokasi di beberapa negara, seperti di Naypyidaw (Myanmar), Putrajaya (Malaysia), dan Sejong (Korea Selatan). Indonesia menghadapi tantangan serupa, dan harapannya adalah belajar dari pengalaman negara lain untuk memaksimalkan keberhasilan proyek ini.

TINJAUAN TOPIK SENTIMEN MASYARAKAT

Dalam studi ini, topik-topik utama yang dibahas terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menghasilkan sentimen positif maupun negatif dari masyarakat, tergantung pada bagaimana mereka memandang dampaknya terhadap kehidupan mereka dan masa depan negara. Tabel 3 menyajikan beberapa topik yang menonjol, beserta perspektif masyarakat yang tercermin melalui diskusi di media sosial.

Tabel 3. Topik perspektif sentimen masyarakat tentang IKN

No.	Topik
1	Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2	Potensi IKN
3	Identitas Nasional
4	UMKM
5	Digitalisasi dan Teknologi pada kota

No.	Topik
6	Potensi Bencana Alam
7	Ketersediaan Air
8	Keanekaragaman Hayati
9	Penggunaan Tenaga Kerja Asing
10	Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat
11	Dampak Sosial dan Budaya Lokal
12	Dampak Lingkungan Jangka Panjang

Setiap topik dalam Tabel 3 ini menunjukkan perspektif masyarakat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Misalnya, pembangunan ekonomi dilihat sebagai aspek positif karena masyarakat percaya bahwa pemindahan IKN dapat membuka peluang baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru. Potensi ini mencakup manfaat bagi sektor-sektor kunci seperti UMKM yang diharapkan mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur baru dan peningkatan aktivitas bisnis di wilayah tersebut. Potensi IKN dan identitas nasional juga mendapatkan tanggapan positif karena banyak yang melihat pemindahan ibu kota sebagai langkah untuk memperkuat Indonesia di tingkat global, baik dari segi simbolik maupun ekonomi. Masyarakat juga memandang bahwa teknologi dan digitalisasi yang akan diterapkan di kota baru ini dapat mendukung perkembangan kota yang lebih maju dan modern, memperkuat daya saing Indonesia di era digital.

Namun, tidak semua tanggapan bersifat positif. Sentimen negatif juga muncul terutama terkait kekhawatiran akan potensi bencana alam dan ketersediaan air di wilayah baru. Masyarakat lokal, khususnya di Kalimantan, khawatir bahwa pembangunan besar-besaran ini dapat mempengaruhi ekosistem alami dan memperparah risiko bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. Selain itu, masalah keanekaragaman hayati menjadi isu penting, mengingat Kalimantan adalah salah satu wilayah yang kaya akan flora dan fauna unik, yang terancam oleh kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, masyarakat juga khawatir terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menggantikan tenaga kerja lokal, menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Sentimen ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan besar terhadap potensi pertumbuhan ekonomi, masyarakat tetap waspada terhadap risiko sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi.

PERSPEKTIF DAN ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT

Pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur membawa berbagai perspektif positif bagi masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi. Salah satu contohnya diungkapkan oleh seorang pengguna media sosial yang berkomentar, "*Pemindahan ibu kota negara akan membuka peluang baru untuk perkembangan ekonomi Indonesia*". Pernyataan ini mencerminkan optimisme masyarakat terhadap potensi pemindahan IKN dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengidentifikasi salah satu tujuan utama pemindahan IKN adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara Pulau Jawa, yang menampung 50 persen populasi Indonesia, dengan wilayah-wilayah lain yang lebih jarang penduduknya, seperti Kalimantan (Berawi, 2022).

Pemindahan ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah baru, dengan penciptaan lapangan kerja di sektor infrastruktur. Saat ini, persiapan infrastruktur telah dimulai untuk menampung hingga 500.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan direlokasi ke IKN. Selain itu, pemerintah berambisi untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang berkelanjutan, seperti industri teknologi bersih, pertanian berkelanjutan, dan energi rendah karbon. Hal ini sejalan dengan konsep 'Smart Forest City', yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan pembangkit listrik tenaga air untuk memenuhi kebutuhan energi ibu kota baru (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021). Strategi pembangunan IKN

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur hingga empat hingga lima kali lipat dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru di wilayah tersebut pada tahun 2045. Dengan demikian, perspektif positif mengenai pembangunan ekonomi ini tidak hanya terbatas pada Kalimantan, tetapi juga dipandang sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Potensi IKN

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur membawa berbagai perspektif positif dari masyarakat, terutama terkait potensinya untuk masa depan Indonesia. Salah satu pengguna media sosial mengungkapkan optimisme mereka dengan komentar, "*IKN menjanjikan masa depan yang cerah bagi Indonesia!*". Lokasi baru Ibu Kota Negara, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan strategis. Pertama, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan terletak di jalur utama transportasi laut, Selat Makassar, yang menghubungkan transportasi nasional dan regional. Kedua, Kalimantan Timur sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai, termasuk bandara, pelabuhan, jalan tol, serta sistem energi dan air, yang akan mendukung pembangunan ibu kota baru. Selain itu, Kalimantan Timur dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, yang dapat menjadi pusat pendukung ekonomi. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah juga diharapkan mengurangi risiko bencana alam. Pemindahan ibu kota ini sejalan dengan visi membentuk pusat ekonomi baru di Indonesia yang lebih merata, menciptakan kesempatan bagi wilayah di luar Pulau Jawa untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. IKN juga diharapkan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memastikan pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan industri ramah lingkungan dan teknologi tinggi, serta mendorong sektor ekonomi yang kompetitif di tingkat global (Yusuf dkk., 2023).

Identitas nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga dipandang positif oleh masyarakat, khususnya dalam hal memperkuat identitas nasional. Seorang pengguna media sosial menyatakan, "*Pemindahan ibu kota negara akan membuka peluang baru untuk perkembangan ekonomi Indonesia*". IKN tidak hanya bertujuan sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai proyek yang menegaskan identitas nasional Indonesia, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. IKN mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan gender, sehingga dirancang untuk mencerminkan keberagaman budaya dan etnis di Indonesia.

Sementara itu, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa merupakan langkah simbolis yang kuat. Pertama, IKN mencerminkan simbol persatuan nasional, merangkul seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan di antara rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah lain di Indonesia. Langkah ini juga mempertegas komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya secara keseluruhan. Selain itu, pemindahan IKN memberikan kesempatan untuk melestarikan identitas lokal di wilayah Kalimantan Timur, dengan mendorong pelestarian budaya dan tradisi unik setempat. IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga platform yang memperkuat multikulturalisme dan menghargai keragaman yang merupakan salah satu kekayaan utama bangsa Indonesia (W. Jati dkk., 2023). IKN berpotensi meningkatkan citra global Indonesia, menegaskan posisi negara sebagai kekuatan yang berpengaruh di tingkat internasional.

Pengembangan ekonomi masyarakat lokal

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dipandang sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi lokal, terutama bagi sektor UMKM. Salah satu pengguna yang terlibat dalam UMKM menyatakan,

"*Kita merasakan dampak positif dari pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, terutama dalam kemajuan UMKM lokal. Melalui proyek ini, peluang usaha bagi UMKM semakin berkembang dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah baru. Hal ini memberikan dorongan positif bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan. Semoga dengan terus berkembangnya proyek ini, UMKM lokal dapat semakin maju dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia*".

UMKM adalah salah satu sektor yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan signifikan dari pemindahan IKN. Menurut organisasi setempat, Nahdlatul Ulama Balikpapan, kehadiran Nusantara di Kalimantan Timur telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal. Mereka menyoroti pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam proses pembangunan, termasuk memastikan hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan sosial, dan tunjangan.

Peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah IKN menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, termasuk dalam penyewaan rumah dan ruko, serta keterlibatan sebagai sub-kontraktor atau pemasok lokal. Dengan adanya proyek ini, UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan pengusaha juga dipandang sebagai langkah strategis yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah pusat dan masyarakat setempat, tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi proyek (Yusuf dkk., 2023).

Digitalisasi dan teknologi pada kota

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga dipandang positif karena fokusnya pada digitalisasi dan teknologi. Salah satu pengguna media sosial menyatakan, "*Menakjubkan melihat langkah maju ini dalam digitalisasi dan teknologi dengan rencana pemindahan IKN! Langkah ini menunjukkan komitmen kita untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa*".

IKN direncanakan menjadi kota dengan ekosistem digital canggih, di mana tata kelola kota lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan berbagai layanan publik, seperti pembayaran pajak, pengajuan izin, dan akses informasi transportasi umum, dilakukan secara digital dan terintegrasi. Ini tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi kota (Sensuse dkk., 2022). Selain itu, teknologi canggih akan diterapkan dalam aspek keamanan publik melalui penggunaan kamera CCTV, sensor pintar, dan sistem pengenalan wajah, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman dan modern. IKN juga berkomitmen untuk menjadi model tata kelola perkotaan berbasis teknologi digital, yang memungkinkan interaksi langsung antara warga dan pemerintah melalui platform interaktif untuk memberikan umpan balik, mengajukan keluhan, atau berpartisipasi dalam pengembangan kota yang berkelanjutan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021).

Digitalisasi di IKN memberikan peluang untuk menciptakan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, di mana semua warga memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar, seperti perumahan terjangkau, layanan kesehatan, dan pendidikan. Penerapan teknologi juga diharapkan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mendorong penggunaan energi terbarukan serta meningkatkan efisiensi energi dalam transportasi dan bangunan. Di samping itu, pelestarian habitat alami dan ruang terbuka hijau menjadi salah satu prioritas, yang tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat. IKN dapat menjadi kota yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan perkotaan modern, termasuk perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketidakpastian ekonomi.

Potensi bencana alam

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama

terkait potensi bencana alam. Seorang pengguna media sosial mengungkapkan kekhawatirannya, "*Saya prihatin melihat pemindahan IKN ke wilayah yang rawan bencana alam. Bukankah seharusnya pemerintah berupaya melindungi rakyat dari ancaman bencana, bukan mengekspos mereka pada risiko yang lebih tinggi?*". Meskipun pemerintah telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis, beberapa risiko lingkungan tetap menjadi perhatian utama, seperti banjir dan degradasi lingkungan di sekitar wilayah IKN (Nurkaidah dkk., 2024; Van de Vuurst & Escobar, 2020). Potensi banjir, terutama di musim hujan, menjadi salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat, meskipun pemerintah mengklaim bahwa kawasan inti pusat pemerintahan relatif aman dari ancaman ini. Namun, daerah di sekitar kawasan IKN, terutama di daerah hilir, tetap rentan terhadap bencana banjir yang dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk kerusakan rumah dan perubahan ekosistem yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat (Perwira dkk., 2024).

Salah satu tantangan utama dalam mencegah bencana adalah pengelolaan kawasan hulu, yang saat ini sebagian besar dikuasai oleh perusahaan yang mengubah keanekaragaman hayati menjadi hutan homogen untuk kepentingan industri. Area ini memainkan peran penting dalam menjaga kesuburan tanah dan mengatur aliran air, yang sangat diperlukan untuk mencegah banjir. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk melebarkan sungai dan mengalihkan aliran air menuju Teluk. Namun, strategi ini tidak lepas dari dampak sosial, seperti penggusuran warga lokal, yang memperburuk kekhawatiran masyarakat tentang potensi risiko sosial dari proyek ini. Meskipun pemindahan IKN sebagian dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di Jakarta, terutama banjir, wilayah baru ini menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan secara serius risiko bencana dan dampak sosial dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota.

Ketersediaan air

Salah satu kekhawatiran utama masyarakat terkait pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah masalah ketersediaan air. Seorang pengguna berkomentar, "*Pemindahan Ibu Kota Negara harusnya memperbaiki masalah infrastruktur, bukan menciptakan masalah baru seperti krisis air. Apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampak ini secara serius?*". Wilayah yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara, seperti Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan, sudah menghadapi tantangan serius terkait pasokan air. Selama musim kemarau, pasokan air bersih sangat terbatas, sedangkan pada musim hujan, daerah ini justru rentan terhadap banjir (Said dkk., 2024). Tantangan ini diperparah oleh peran swasta dalam penyediaan air, seperti PT. Arsari Tirta Pradana, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi keuntungan pribadi dari proyek ini, mengesampingkan kepentingan masyarakat umum (Pusung dkk., 2023).

Pemerintah setempat telah berusaha mencari solusi melalui pembangunan bendungan, tetapi proyek ini menghadapi hambatan dana yang signifikan. Selain itu, masalah legalitas lahan juga menjadi perhatian besar, mengingat sebagian besar lahan di kawasan ibu kota baru telah dikuasai oleh korporasi dengan izin untuk kegiatan kehutanan, pertanian, dan pertambangan. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat akses terhadap sumber daya air yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat luas. Tantangan terkait ketersediaan air di wilayah IKN memerlukan penanganan yang hati-hati dan berkelanjutan dari pemerintah. Jika masalah ini tidak segera diatasi, potensi krisis air dapat mengancam keberhasilan proyek pemindahan ibu kota dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Keanekaragaman hayati

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu pengguna mengungkapkan, "*Pemindahan IKN ke wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati adalah ancaman serius bagi ekosistem dan spesies endemik di sana*". Wilayah yang akan menjadi lokasi IKN merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik, seperti pesut dan bekantan,

yang terancam oleh kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri. Ekspansi industri yang terus berlanjut, ditambah dengan aktivitas kapal besar yang semakin meningkat, telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang di sekitar Teluk Balikpapan. Hal ini tidak hanya mengancam spesies laut, tetapi juga merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut (Van de Vuurst & Escobar, 2020). Selain itu, masyarakat lokal, khususnya petani, merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek IKN. Banyak petani khawatir akan digusur dari lahan pertanian yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan atau pendidikan untuk beralih ke pekerjaan lain, sehingga proyek ini dipandang sebagai ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup mereka (Perwira dkk., 2024).

Permasalahan serupa juga muncul di pusat konservasi orangutan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah ini telah dirambah oleh pihak-pihak tertentu, dan izin pertambangan diberikan tanpa berkonsultasi dengan pengelola konservasi. Masyarakat setempat dan aktivis lingkungan menyatakan keprihatinan bahwa pembangunan IKN akan semakin merusak kawasan konservasi jika tidak ada penegakan hukum yang ketat dan perhatian khusus terhadap perlindungan lingkungan. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan mengusung konsep kota hutan yang berkelanjutan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas utama. Masyarakat berharap agar keputusan terkait proyek ini direvisi, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang signifikan dan memberikan kejelasan tentang bagaimana ekosistem dan keanekaragaman hayati akan dilindungi dalam proses pembangunan IKN.

Penggunaan tenaga kerja asing

Penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu pengguna menyatakan,

> "*Kami kecewa melihat penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek IKN. Bukankah ini akan merampas kesempatan kerja dari rakyat Indonesia sendiri? Negara seharusnya lebih memprioritaskan pengembangan tenaga kerja lokal daripada mengandalkan sumber daya manusia dari luar negeri. Penggunaan tenaga kerja asing hanya akan menguntungkan pihak asing dan menambah beban sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia*".

Salah satu alasan utama penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kekhawatiran bahwa kesempatan kerja bagi penduduk lokal akan berkurang. Masyarakat khawatir bahwa tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sejenis tidak akan mendapat prioritas dalam proyek ini, sehingga menambah tekanan pada pasar tenaga kerja domestik (Kusno, 2024). Selain itu, penggunaan tenaga kerja asing juga menimbulkan risiko dalam hal transfer teknologi dan pengetahuan. Jika tenaga kerja asing mendominasi proyek ini, pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki mungkin tidak tersampaikan dengan baik kepada tenaga kerja lokal, sehingga pengembangan kapasitas tenaga kerja Indonesia cenderung terhambat. Dari sisi sosial, ada kekhawatiran bahwa keberadaan tenaga kerja asing dapat mengganggu harmoni sosial dan budaya lokal. Masyarakat merasa bahwa ketidakseimbangan dalam kondisi kerja dan standar upah antara tenaga kerja lokal dan asing dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Ini terutama relevan dalam konteks proyek IKN, yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Ketidaksetujuan terhadap penggunaan tenaga kerja asing mencerminkan kekhawatiran jangka panjang masyarakat akan dampak proyek ini terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan (Kamal, 2022).

PERSPEKTIF KALANGAN INTERNASIONAL

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menarik perhatian dari berbagai kalangan internasional. Diskusi

mengenai proyek ambisius ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga meluas ke media sosial, portal berita internasional, dan publikasi media massa. Data yang diambil dari unggahan di media sosial seperti Twitter, serta analisis dari berbagai portal berita internasional dan publikasi media menunjukkan beragam perspektif dari komunitas internasional terkait proyek ini.

Dari perspektif internasional, pemindahan IKN dipandang sebagai langkah ambisius yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga lingkungan. Beberapa pengamat menyatakan kekaguman terhadap keberanian Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan, namun mereka juga menyampaikan kekhawatiran terkait kecepatan proses pemindahan dan potensi risiko yang mungkin timbul. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam pidatonya terkait perubahan iklim, turut menyampaikan perhatiannya terhadap proyek ini. Biden menyatakan, "*Sejumlah negara lain, seperti Mesir, Myanmar, dan Korea Selatan, telah memindahkan ibu kota mereka dengan berbagai pertimbangan. Namun, pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan oleh Indonesia dianggap lebih ambisius dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah, termasuk korupsi dan proses yang terlalu cepat*". Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran global mengenai dampak lingkungan dan tata kelola yang mungkin muncul dari proyek tersebut.

Selain itu, isu lingkungan menjadi salah satu topik yang dominan dalam diskusi di media sosial dan publikasi internasional seperti *The Guardian* dan *Al Jazeera*. Mereka menyoroti potensi risiko terhadap keanekaragaman hayati Kalimantan dan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Meski pemerintah Indonesia telah merencanakan pembangunan dengan konsep *Smart Forest City*, pengamat internasional menekankan bahwa eksekusi proyek ini harus mengutamakan prinsip keberlanjutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

Tantangan tata kelola juga menjadi sorotan para analis internasional. Beberapa pengamat mencatat bahwa proyek sebesar IKN berisiko menjadi target korupsi, seperti yang terjadi di beberapa negara dengan proyek infrastruktur besar. Media massa internasional, seperti *Foreign Policy*, menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penerapan standar transparansi tinggi untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien. Para analis juga merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi praktik tata kelola yang lebih baik dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap proyek ini.

Di sisi ekonomi, meskipun proyek ini menimbulkan kekhawatiran, minat kuat dari investor asing seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi baru di Asia Tenggara. Diskusi di media sosial dan portal berita internasional banyak membahas potensi IKN sebagai pusat investasi baru di Asia Tenggara. Jika Indonesia dapat menjamin stabilitas politik dan regulasi yang jelas, proyek ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. Secara keseluruhan, analisis dari berbagai sumber internasional menunjukkan bahwa pemindahan IKN dipandang sebagai langkah yang ambisius dengan potensi besar, namun disertai dengan tantangan signifikan di bidang lingkungan, tata kelola, dan ekonomi. Pengamat internasional menekankan pentingnya transparansi dan keberlanjutan untuk memastikan keberhasilan proyek ini dan mempertahankan kepercayaan global terhadap Indonesia.

PERSPEKTIF DARI MASYARAKAT LOKAL

Dalam rangka memperkaya analisis, penggunaan data dari masyarakat lokal di Kalimantan Timur dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai ketidakseimbangan dalam proses pemindahan IKN. Masyarakat lokal, yang lebih terpengaruh secara langsung oleh perubahan fisik dan sosial, mungkin memiliki pandangan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di Jakarta yang lebih fokus pada manfaat jangka panjang seperti pengurangan beban infrastruktur di ibu kota lama, sehingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur telah memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat lokal, yang merasa bahwa dampak langsung terhadap kehidupan mereka belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pemerintah. Perspektif ini mencakup beberapa aspek utama yang menjadi

perhatian warga, berdasarkan informasi dari media massa, video dokumentasi wawancara, dan laporan organisasi masyarakat.

Walaupun dampak negatif pemindahan IKN sering kali menjadi sorotan, banyak warga juga melihat potensi besar yang ditawarkan oleh proyek ini. Peluang ekonomi dari pembangunan infrastruktur skala besar membuka kesempatan bagi bisnis lokal dan tenaga kerja untuk berpartisipasi. Peningkatan infrastruktur di wilayah ini juga dipandang akan membawa manfaat jangka panjang bagi kualitas hidup, seperti akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, warga berharap bahwa pembangunan IKN akan mendorong sektor pariwisata dan mengangkat potensi alam serta budaya lokal Kalimantan Timur. Meskipun ada kekhawatiran tentang dampak sosial dan lingkungan, perspektif positif ini mencerminkan harapan warga lokal untuk masa depan yang lebih baik, serta pengakuan dan perhatian yang lebih besar terhadap wilayah mereka.

Peluang peningkatan ekonomi lokal

Beberapa warga lokal melihat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai peluang besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pembangunan besar-besaran ini diproyeksikan akan memicu pertumbuhan di berbagai sektor, seperti perdagangan, konstruksi, dan UMKM. Banyak warga berharap dapat terlibat langsung dalam proyek ini, baik sebagai pekerja maupun penyedia jasa lokal. Seorang pengusaha dari Penajam Paser Utara, misalnya, menyampaikan harapannya, "*Proyek IKN akan membuka peluang besar bagi bisnis-bisnis lokal. Kami bisa menjadi pemasok bahan bangunan dan layanan terkait lainnya.*" Menurut proyeksi pemerintah, lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan akan tercipta di sektor konstruksi, UMKM, dan perdagangan lokal selama pembangunan ini berlangsung.

Peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik

Msayarakat lokal juga menyadari bahwa pembangunan IKN akan membawa peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah mereka. Jalan-jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya akan dibangun atau diperbarui, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini memberikan harapan besar bahwa wilayah yang sebelumnya dianggap tertinggal akan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat, terutama dalam hal layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. "*Semoga dengan adanya pembangunan IKN, fasilitas publik yang selama ini kurang memadai bisa diperbaiki. Kami butuh jalan yang lebih baik dan akses ke rumah sakit yang lebih dekat,*" ungkap seorang warga setempat.

Pengembangan pariwisata dan potensi wilayah

Sebagian warga juga optimis bahwa pemindahan IKN akan membuka peluang baru di sektor pariwisata. Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti hutan hujan tropis, pantai, serta budaya lokal yang unik. Adanya peningkatan terhadap perhatian pada wilayah ini, banyak yang berharap pariwisata bisa berkembang pesat. Seorang pengusaha lokal dalam industri pariwisata menyatakan, "*Dengan semakin banyaknya orang yang datang ke sini, kami berharap sektor pariwisata bisa tumbuh. Wisata alam dan budaya kami bisa jadi daya tarik besar, dan ini akan meningkatkan pendapatan warga yang bekerja di bidang ini*".

Pengakuan nasional terhadap Kalimantan Timur

Banyak warga merasa bangga bahwa Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Mereka melihat hal ini sebagai pengakuan nasional terhadap wilayah mereka, yang selama ini sering dianggap kurang berkembang dibandingkan dengan Pulau Jawa. Adanya proyek ini, warga berharap daerah mereka akan semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. "*Saya merasa bangga. Akhirnya Kalimantan Timur diakui sebagai bagian penting dari negara ini. Semoga pemindahan ini bisa memberikan dampak positif dan membawa kemajuan bagi wilayah kami*", ujar seorang warga lokal dengan penuh harapan.

Dampak terhadap area lahan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dipandang oleh masyarakat lokal sebagai proyek besar yang membawa dampak luas, terutama terkait perubahan tata guna lahan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pembukaan hutan dan potensi hilangnya habitat alami yang mereka andalkan untuk mata pencaharian. Sejumlah warga lokal telah menyatakan bahwa pembangunan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan mereka selama bertahun-tahun.

Warga dari Desa Bumi Harapan, menyatakan bahwa akses mereka terhadap air bersih sudah semakin terbatas, terutama selama musim kemarau. "*Kami khawatir pembangunan ibu kota baru ini akan memperparah masalah air yang sudah ada*", kata seorang warga setempat. Mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang hilangnya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama. Selain itu, masyarakat adat di sekitar Kalimantan Timur juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak budaya dari proyek ini. "*Tanah ini memiliki nilai spiritual bagi kami, dan kami berharap pemerintah menghormati dan melindungi warisan budaya kami*", ujar salah satu pemimpin komunitas adat.

Sementara itu, media massa lokal melaporkan bahwa perubahan luas dalam penggunaan lahan, termasuk pembukaan hutan dan habitat alami lainnya, berpotensi memberikan dampak besar terhadap keanekaragaman hayati di daerah tersebut, sehingga memengaruhi spesies yang sudah terancam punah dan fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan lokal. Hilangnya habitat alami juga mengancam siklus unsur hara dan pembentukan tanah, yang sangat vital bagi pertanian lokal. Warga yang bekerja sebagai petani menyatakan bahwa perubahan tata guna lahan ini dapat mengganggu produksi pertanian mereka dan memaksa mereka mencari sumber penghidupan lain. Selain itu, rencana pembangunan infrastruktur besar seperti jalan baru dan gedung pemerintahan, dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati semakin memburuk. Masyarakat khawatir bahwa pembangunan jalan baru dapat mengisolasi populasi satwa liar, menghambat akses ke sumber makanan dan pasangan bagi satwa, serta meningkatkan polusi yang mengancam kesehatan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga menyoroti bahwa pembangunan ini dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, yang berpotensi memperparah perubahan iklim dan secara tidak langsung memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyatakan bahwa mereka akan menerapkan rencana zonasi lahan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan, namun masyarakat lokal tetap menuntut lebih banyak kejelasan terkait pelaksanaan dan dampaknya bagi mereka secara langsung.

Dampak terhadap lingkungan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungan. Masyarakat lokal, aktivis, dan para ahli lingkungan mengungkapkan bahwa proyek besar ini dapat memperburuk kondisi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan erosi tanah. Sebagai proyek yang membutuhkan perubahan besar dalam tata guna lahan, IKN berpotensi menyebabkan deforestasi besar-besaran, yang pada gilirannya dapat merusak habitat satwa liar dan flora endemik.

Masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari khawatir akan kehilangan sumber daya alam yang vital. Seorang warga setempat menyatakan, "*Hutan di sini adalah bagian dari kehidupan kami. Dengan dibukanya lahan untuk pembangunan, kami khawatir akan kehilangan flora dan fauna yang penting bagi keseimbangan ekosistem*". Selain itu, beberapa warga juga melaporkan bahwa penurunan kualitas air dan udara sudah mulai terasa bahkan sebelum pembangunan dimulai. Kekhawatiran lainnya terkait degradasi tanah, yang diprediksi akan terjadi akibat konversi lahan yang masif untuk pembangunan infrastruktur. Degradasi tanah ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan, produktivitas pertanian, dan bahkan memperburuk dampak perubahan

iklim akibat hilangnya penyimpanan karbon di tanah.

Sementara itu, data dari media massa dan laporan lingkungan menunjukkan bahwa dampak lingkungan ini tidak hanya mengancam spesies yang terancam punah, tetapi juga kesehatan manusia. Hilangnya tanaman obat dan peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui vektor menjadi beberapa dampak tidak langsung yang mengancam kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah telah berjanji untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan, termasuk zonasi lahan yang melindungi area ekologis penting. Namun, masyarakat lokal dan aktivis tetap menuntut langkah-langkah konkret dan lebih banyak keterbukaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa dampak lingkungan diminimalkan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Dampak terhadap aspek sosial dan budaya

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur memunculkan kekhawatiran yang mendalam terkait dampak sosial di kalangan masyarakat lokal. Salah satu perhatian utama adalah potensi rusaknya struktur sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun di komunitas-komunitas lokal. Media massa lokal sering melaporkan keresahan warga mengenai kemungkinan penggusuran paksa, perpindahan penduduk, dan berkurangnya ruang komunal yang selama ini menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Kehilangan ruang ini berpotensi melemahkan ikatan sosial serta mengganggu praktik-praktik budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selain itu, kehadiran tenaga kerja asing dalam proyek pembangunan ibu kota juga menimbulkan kekhawatiran. Masyarakat lokal takut bahwa masuknya pendatang baru, terutama dari luar negeri, dapat menimbulkan gesekan sosial dan mempengaruhi budaya lokal. "*Kami khawatir tentang siapa yang akan datang dan bagaimana mereka akan mempengaruhi budaya kami*". ungkap seorang warga dalam wawancara dengan surat kabar lokal. Pendatang baru yang tidak familiar dengan tradisi lokal mungkin akan memicu ketegangan budaya yang dapat memperburuk kondisi sosial di daerah tersebut.

Salah satu dampak sosial terbesar yang dihadapi adalah potensi pengusiran paksa masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan kelompok marginal. Proyek ini kemungkinan besar memerlukan konversi lahan secara besar-besaran, yang berisiko menyebabkan pengusiran paksa dari tanah adat dan tempat tinggal mereka. Pengusiran ini tidak hanya menghilangkan akses masyarakat lokal ke sumber mata pencaharian, tetapi juga merusak jaringan sosial yang telah terbentuk, memisahkan komunitas, dan mengganggu praktik budaya yang penting. Kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan diperkirakan akan mengalami dampak yang lebih besar karena mereka seringkali tidak memiliki akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Pembangunan IKN juga dapat membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan budaya di wilayah tersebut. Migrasi penduduk dalam skala besar untuk mendukung pembangunan dapat mengganggu jaringan sosial dan memaksa masyarakat untuk membentuk hubungan baru dan membangun kepercayaan di lingkungan baru. Perubahan ini bisa berdampak pada praktik-praktik budaya dan tradisi lokal, karena pendatang baru mungkin tidak familiar atau tidak menghormati norma-norma dan adat istiadat setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik budaya serta memperdalam kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Selain itu, peningkatan populasi di wilayah sekitar IKN berisiko meningkatkan persaingan atas sumber daya seperti pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Masyarakat lokal khawatir bahwa tekanan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, peningkatan tingkat kejahatan, dan masalah sosial lainnya.

Dampak terhadap anggaran dan penggunaan dana

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat lokal, terutama terkait besarnya anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan laporan dari media massa, banyak

warga merasa bahwa dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal. Seorang tokoh masyarakat menyatakan, "*Kami merasa bahwa uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sudah ada daripada membangun ibu kota baru*". Meskipun proyek IKN diharapkan membawa manfaat ekonomi, banyak yang berpandangan bahwa kebutuhan masyarakat yang ada seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu.

Sementara itu, pemerintah menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengatasi masalah kronis Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan banjir. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru di Kalimantan Timur dan kawasan lain di Indonesia. Namun, proyek ini memerlukan waktu sekitar sepuluh tahun untuk selesai, dengan perkiraan anggaran yang sangat besar. Tantangan utama dalam proses ini adalah menemukan model pendanaan yang tepat untuk mendukung keberlangsungan proyek. Pemerintah telah mengalokasikan sebagian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi banyak bergantung pada investasi sektor swasta. Untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan, pemerintah telah mengajak perusahaan lokal dan internasional untuk membentuk kemitraan publik-swasta. Namun, tantangan muncul karena pemerintah tidak memberikan jaminan bagi para investor, yang membuat banyak pihak masih ragu.

Menurut Undang-Undang IKN, pendanaan proyek ini akan bersumber dari APBN dan sumber di luar APBN. Dana dari APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan mendukung operasional pemerintahan. Sementara itu, diharapkan investasi swasta akan membantu pembangunan IKN yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kolaborasi internasional untuk memperluas sumber pendanaan agar sejalan dengan visi IKN sebagai kota yang berkelanjutan dan progresif. Durasi proyek yang panjang, yang diperkirakan berlangsung selama satu dekade, menambah kompleksitas dalam hal pendanaan. Untuk menjaga stabilitas arus dana, pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen jangka panjang dan visi yang sesuai. Keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang cukup, tetapi juga pada keselarasan strategi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional.

Dampak terhadap keterbukaan pemerintah

Salah satu kritik utama dari masyarakat lokal terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah minimnya keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Meskipun pemerintah telah mengadakan beberapa pertemuan dengan warga, banyak yang merasa bahwa partisipasi mereka masih sangat terbatas. Beberapa warga mengungkapkan bahwa meskipun diundang untuk berdiskusi, keputusan penting sudah diambil tanpa mempertimbangkan masukan mereka. "*Kami diundang ke pertemuan, tetapi pada akhirnya, keputusan sudah dibuat tanpa masukan nyata dari kami*", kata seorang warga yang merasa kecewa. Selain itu, warga mengeluhkan kurangnya informasi yang jelas mengenai dampak jangka panjang proyek ini terhadap mereka, termasuk potensi penggusuran dan perubahan lahan yang akan mereka hadapi.

Laporan media massa juga menyebutkan bahwa, meskipun pemerintah aktif mempromosikan IKN sebagai kota yang modern dan berkelanjutan, kekhawatiran tetap muncul dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen, akademisi, dan warga lokal. Kekhawatiran ini berpusat pada besarnya anggaran yang dialokasikan, yang menurut beberapa warga seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. "*Dana yang besar ini seharusnya lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat*", ungkap seorang tokoh masyarakat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa proyek ini dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, termasuk peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur modern.

DINAMIKA SENTIMEN PUBLIK TERHADAP PEMINDAHAN IKN: HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN

Tabel 4 merangkum sentimen positif dan negatif dari masyarakat terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, serta memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil pemerintah untuk menanggulangi kekhawatiran yang muncul. Sentimen positif umumnya berasal dari harapan akan penguatan identitas nasional, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur, baik di wilayah baru maupun sebagai solusi untuk masalah infrastruktur di Jakarta. Di sisi lain, sentimen negatif cenderung mencerminkan kekhawatiran terkait ketidakpastian, dampak sosial dan lingkungan, serta risiko kesenjangan pembangunan dan korupsi dalam pelaksanaan proyek.

Tabel 4. Ringkasan sentimen positif dan negatif serta rekomendasi tindakan pemerintah

Aspek	Deskripsi	Rekomendasi
Sentimen Positif		
Penguatan Identitas Nasional	Pemindahan IKN dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia dengan mencerminkan keragaman budaya.	Pemerintah dapat memastikan bahwa desain IKN mencerminkan warisan budaya nasional, melibatkan perwakilan daerah dalam proses perencanaan, dan mempromosikan multikulturalisme.
Pengembangan Ekonomi Lokal	IKN membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan investasi infrastruktur.	Pemerintah dapat bekerja sama dengan UMKM lokal dan memberikan pelatihan keterampilan untuk memaksimalkan dampak ekonomi. Inklusi pengusaha lokal dalam tender proyek juga penting.
Penyelesaian Masalah Infrastruktur di Jakarta	Pemindahan IKN diharapkan mengurangi beban infrastruktur di Jakarta, termasuk kemacetan dan polusi.	Sebelum IKN sepenuhnya dipindahkan, pemerintah dapat memulai dengan mengurangi tekanan di Jakarta melalui peningkatan transportasi umum dan perbaikan infrastruktur yang ada.
Pemberdayaan Wilayah Non Jawa	Pemindahan IKN ke Kalimantan diharapkan menyeimbangkan pembangunan antara wilayah Jawa dan non-Jawa.	Pemerintah harus fokus pada pembangunan berkelanjutan di wilayah non-Jawa, menciptakan strategi inklusif yang tidak hanya memprioritaskan Kalimantan, tetapi juga daerah lain.
Rencana Pembangunan Berkelanjutan	IKN memberikan kesempatan untuk perencanaan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan dengan fokus pada energi terbarukan.	Pemerintah harus menetapkan standar lingkungan yang tinggi, termasuk target pengurangan emisi, konservasi air, dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan.
Mendorong Pertumbuhan dan Inovasi Nasional	Pemindahan IKN dapat menjadi katalisator pertumbuhan dan inovasi di berbagai sektor.	Pemerintah dapat memprioritaskan sektor-sektor teknologi tinggi, memberikan insentif untuk riset dan pengembangan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi.
Sentimen Negatif		
Ketidakpastian dan Ketidakjelasan	Masyarakat merasa ketidakjelasan terkait rencana pemindahan IKN, menciptakan ketidakpercayaan dan kekhawatiran.	Pemerintah harus lebih transparan dalam membagikan informasi tentang anggaran, dampak, dan proses perencanaan IKN melalui audiensi publik, media massa, dan platform digital.

Aspek	Deskripsi	Rekomendasi
Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Lokal	Pemindahan IKN dikhawatirkan menyebabkan penggusuran dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal.	Pemerintah perlu menyediakan kompensasi yang adil, perumahan alternatif, dan dukungan bagi masyarakat terdampak serta memastikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.
Kerugian Lingkungan dan Ekologi	Pembangunan infrastruktur IKN dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.	Implementasi program konservasi yang ketat diperlukan, termasuk upaya reforestasi, pembatasan penggunaan lahan, dan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan proyek.
Perubahan Sosial dan Budaya	Masyarakat lokal khawatir tentang potensi perubahan sosial dan budaya akibat urbanisasi dan modernisasi cepat.	Pemerintah dapat membangun pusat budaya lokal dan program pelestarian budaya untuk memastikan budaya lokal tetap terjaga. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus ditingkatkan.
Kesenjangan Pembangunan Antar wilayah	Ada kekhawatiran bahwa pemindahan IKN dapat meningkatkan kesenjangan pembangunan di wilayah lain yang memerlukan perhatian.	Pemerintah harus memprioritaskan distribusi anggaran pembangunan yang adil ke wilayah lain di luar Kalimantan, untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara daerah-daerah.
Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang	Risiko korupsi dalam proyek IKN sangat tinggi mengingat skala besar proyek ini.	Diperlukan pengawasan ketat dari lembaga independen serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa proyek ini menimbulkan harapan sekaligus kekhawatiran di kalangan masyarakat. Sentimen positif mencerminkan potensi besar yang dapat dihadirkan oleh IKN, seperti penguatan identitas nasional, pengembangan ekonomi lokal, dan penyelesaian masalah infrastruktur yang selama ini membebani Jakarta. Masyarakat juga melihat peluang dalam pemberdayaan wilayah di luar Pulau Jawa serta perencanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, di sisi lain, sentimen negatif tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian mengenai rencana pemindahan, dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, serta kerugian lingkungan dan perubahan sosial budaya menjadi isu-isu krusial yang membutuhkan perhatian serius. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih transparan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak.

Pemerintah diharapkan dapat meng-implementasikan rekomendasi yang ada untuk memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari pemindahan IKN. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, IKN dapat menjadi simbol perubahan yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan lingkungan.

Sementara itu, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung. Sentimen negatif paling dominan berkisar pada kekhawatiran tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu utama yang dihadapi masyarakat adalah potensi penggusuran. Banyak warga khawatir akan kehilangan tempat tinggal dan lahan yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun, yang juga merupakan sumber mata pencaharian melalui pertanian, perikanan, dan pemanfaatan sumber daya alam setempat. Mereka merasa bahwa proyek besar ini bisa mengancam akses terhadap sumber daya tersebut, yang berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi di wilayah mereka.

Dari sisi lingkungan, kekhawatiran tentang kerusakan ekosistem hutan di Kalimantan Timur sangat menonjol. Masyarakat khawatir bahwa pembangunan IKN akan mempercepat deforestasi, mengancam keberlangsungan flora dan fauna lokal, serta memperburuk polusi udara, air, dan tanah. Dampak lingkungan ini tidak hanya akan memengaruhi kesehatan masyarakat lokal, tetapi juga memperburuk perubahan iklim secara global. Selain itu, masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan proyek ini, sehingga transparansi terkait bagaimana proyek akan dilaksanakan dan siapa yang akan diuntungkan masih dirasa kurang memadai.

Namun, di balik kekhawatiran ini, ada juga masyarakat yang melihat potensi positif dari pemindahan IKN. Mereka berharap bahwa proyek ini akan membuka peluang baru untuk meningkatkan ekonomi lokal, terutama di sektor konstruksi, jasa, dan pariwisata. Beberapa warga lokal mengharapkan proyek ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, infrastruktur yang lebih baik, termasuk jalan, sekolah, dan rumah sakit, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup warga setempat dalam jangka panjang. Harapan mereka adalah bahwa daerah yang selama ini kurang berkembang akan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Masyarakat lokal, khususnya di Kalimantan Timur, merasa bahwa mereka belum mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait apakah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan benar-benar memberikan manfaat yang merata untuk semua orang. Meskipun pemerintah menjanjikan banyak hal positif, seperti peningkatan ekonomi lokal dan infrastruktur, warga masih mempertanyakan apakah manfaat ini akan benar-benar dirasakan oleh semua penduduk, atau justru hanya akan menguntungkan kelompok kecil saja, seperti pengusaha besar atau pemerintah. Mereka khawatir bahwa dampak negatif, seperti penggusuran, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi, akan lebih banyak dirasakan oleh mereka yang paling terdampak, sementara manfaat jangka panjangnya belum jelas.

Secara keseluruhan, sentimen masyarakat lokal di Kalimantan Timur terhadap pemindahan IKN mencerminkan campuran antara harapan dan kekhawatiran. Di satu sisi, mereka mengakui potensi pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur di wilayah mereka. Namun, di sisi lain, mereka tidak bisa mengabaikan kekhawatiran mendasar terkait dampak lingkungan, penggusuran, dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal berharap bahwa suara mereka akan didengar dan dampak langsung terhadap kehidupan mereka diperhitungkan dengan lebih serius oleh pemerintah. Untuk mengatasi sentimen negatif ini, pemerintah perlu mengambil langkah lebih proaktif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan IKN. Transparansi, keadilan dalam proses relokasi, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, manfaat jangka panjang dari pemindahan ibu kota diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya sebagian kecil masyarakat. Penulis telah membuat sebuah gambaran mengenai Kebijakan dan Langkah Mitigasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah seperti yang dilihat pada Gambar 5.

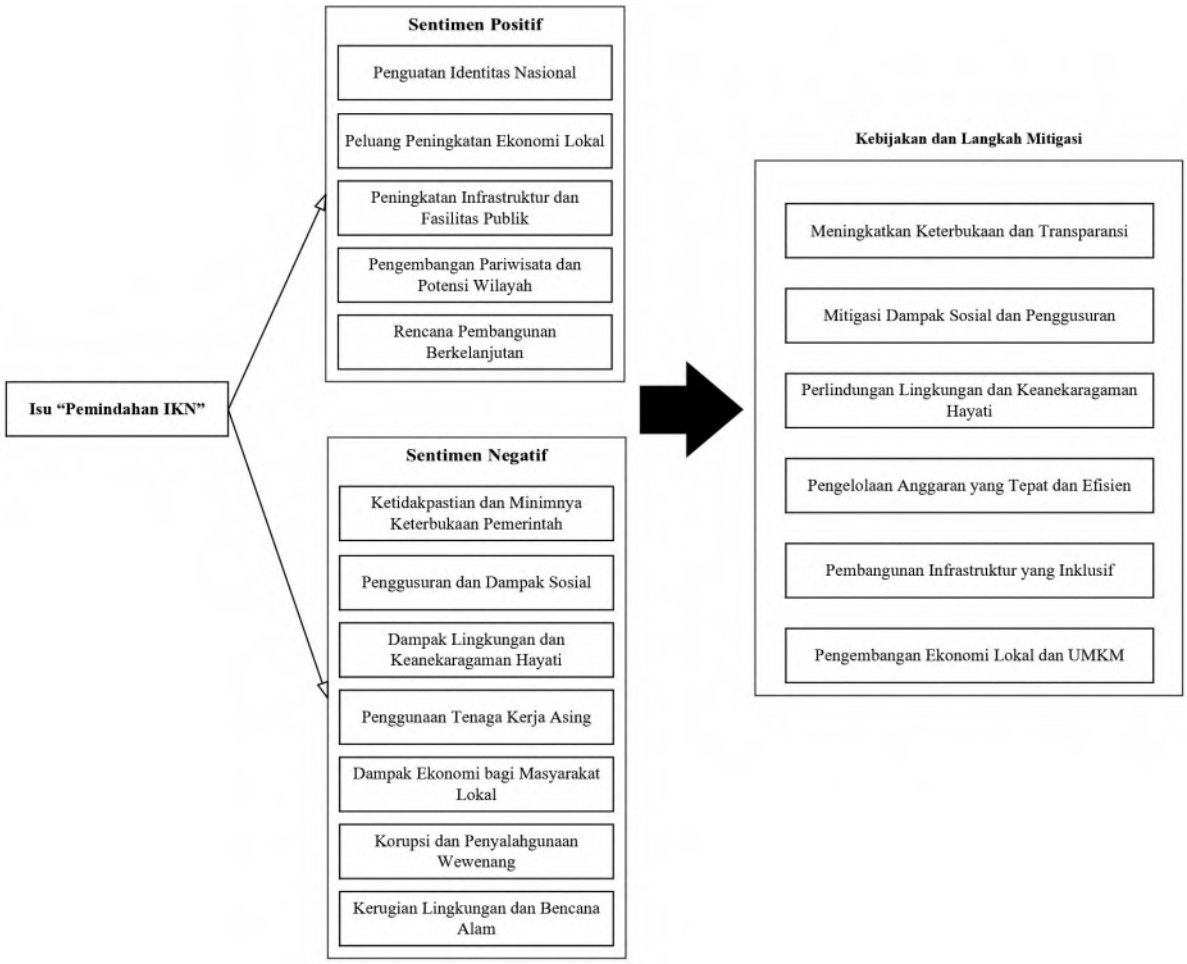

Gambar 5. Kebijakan dan langkah mitigasi

Kritik utama yang disampaikan adalah minimnya keterbukaan pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Meskipun beberapa pertemuan telah diadakan, banyak warga merasa suara mereka tidak didengar. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa pengambilan keputusan lebih inklusif dan transparan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membuka konsultasi publik yang bermakna, di mana masukan dari masyarakat lokal benar-benar diambil dalam pertimbangan nyata. Selain itu, penting untuk membangun platform komunikasi yang terbuka agar informasi terkait perkembangan proyek, termasuk dampaknya bagi masyarakat, dapat diakses secara luas. Pembentukan komite pengawas independen juga bisa membantu memastikan bahwa proyek IKN berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari sisi sosial, kekhawatiran terbesar masyarakat adalah potensi penggusuran dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses relokasi dilakukan secara adil dan bermartabat, dengan memberikan kompensasi yang layak dan menyediakan perumahan alternatif yang memadai. Pelibatan masyarakat adat dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan keberlanjutan sosial. Pemerintah dapat menawarkan pelatihan keterampilan dan peluang kerja baru bagi warga lokal, sehingga mereka bisa berpartisipasi dan meraih manfaat ekonomi dari proyek pembangunan ini.

Dampak lingkungan dari proyek IKN juga menjadi kekhawatiran serius bagi masyarakat lokal dan aktivis lingkungan. Pemindahan IKN berpotensi mengganggu ekosistem alami dan mengancam keanekaragaman hayati di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah mitigasi yang

komprehensif untuk mengurangi dampak ini. Upaya untuk mengurangi deforestasi dan memastikan pembukaan lahan dilakukan secara bijak perlu diprioritaskan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau. Kolaborasi dengan organisasi lingkungan juga harus diperkuat untuk memantau dan menangani dampak lingkungan selama proses pembangunan.

Dalam aspek pengelolaan anggaran, dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk proyek ini, pemerintah harus mengelola dana publik dengan bijaksana dan efisien. Penggunaan anggaran harus diprioritaskan pada kebutuhan mendesak masyarakat lokal, seperti perbaikan infrastruktur dasar di sekitar wilayah proyek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penggunaan dana harus diterapkan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur di IKN juga harus bersifat inklusif dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan, yang dapat diakses oleh semua kalangan, harus menjadi prioritas utama. Selain itu, akses yang merata terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan teknologi digital perlu dipastikan untuk mendukung kesejahteraan warga lokal. Pemerintah juga harus menciptakan ruang komunal yang memfasilitasi interaksi sosial dan membantu menjaga kohesi sosial di tengah perubahan besar yang terjadi. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan IKN memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat lokal, terutama melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah dapat memberikan dukungan modal dan pelatihan bagi UMKM lokal agar mereka dapat tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi di sekitar wilayah proyek. Selain itu, kolaborasi antara pengusaha lokal dan proyek IKN perlu didorong, baik sebagai subkontraktor maupun penyedia layanan, agar ekonomi lokal berkembang seiring dengan pembangunan ibu kota baru.

PENUTUP

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah langkah strategis yang diharapkan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Studi ini telah mengupas beragam perspektif dari masyarakat lokal dan nasional, dengan menyoroti sentimen positif dan negatif terkait proyek ambisius ini. Di satu sisi, banyak yang melihat pemindahan ini sebagai peluang untuk memperkuat identitas nasional, mengembangkan ekonomi lokal, dan mengatasi permasalahan infrastruktur di Jakarta. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran besar dari masyarakat lokal terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya potensi penggusuran serta kerusakan ekosistem yang berharga. Sentimen negatif ini menunjukkan bahwa meskipun proyek ini memiliki potensi besar, pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan adil sangat diperlukan.

Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat dari pemindahan IKN dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat yang terdampak langsung. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan lingkungan yang ketat, serta pengelolaan anggaran yang transparan akan menjadi faktor kunci keberhasilan proyek ini. Dengan demikian, pemindahan ibu kota tidak hanya akan menjadi simbol modernisasi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ini tercapai, maka IKN akan menjadi proyek yang tidak hanya mengubah wajah Indonesia secara fisik, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi untuk masa depan.

Sementara itu, untuk meningkatkan representasi sentimen masyarakat lokal, studi di masa depan sebaiknya mencakup data yang lebih komprehensif dari masyarakat di wilayah IKN, melalui survei lapangan atau wawancara, pandangan lokal yang lebih spesifik dapat diintegrasikan ke dalam studi ini, sehingga memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai dampak pemindahan ibu kota.

PUSTAKA ACUAN

Abubakar, I. R., & Doan, P. L. (2017). Building new capital cities in Africa: Lessons for new satellite towns in developing countries. *African Studies*, *76*(4), 546–565.

Berawi, M. A. (2022). City of Tomorrow: The New Capital City of Indonesia. *International Journal of Technology*, *13*(4), 690–694. https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i4.6011

Biswas, R., Jana, A., Arya, K., & Ramamritham, K. (2019). A good-governance framework for urban management. *Journal of Urban Management*, *8*(2), 225–236.

Colven, E. (2020). Subterranean infrastructures in a sinking city: The politics of visibility in Jakarta. *Critical Asian Studies*, *52*(3), 311–331.

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. (2019). *Opini Masyarakat Mengenai Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Timur*. Opini Masyarakat Mengenai Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Timur. https://sosiologi.fisip.unair.ac.id/opini-masyarakat-mengenai-pemindahan-ibukota-ke-kalimantan-timur/

Farhan, F., Gunawan, A., Putra, K. A., Fikry, K. I. A. Z., & Mas'ud, T. M. (2022). The Moving of Indonesiaâ€™s Capital City and Its Legality Within Its Constitutional System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *10*(2), Article 2.

Hartmann, J., Heitmann, M., Siebert, C., & Schamp, C. (2023). More than a Feeling: Accuracy and Application of Sentiment Analysis. *International Journal of Research in Marketing*, *40*(1), 75–87.

Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 3.

Jati, W. R. (2022, Februari 24). *A new Indonesian capital city: Conflict pending*. https://ipsh.brin.go.id/2022/02/24/a-new-indonesian-capital-city-conflict-pending/

Jati, W., Syahid, C., Lissandhi, A. N., & Maulana, Y. (2023). Assessing the Implementation of a 'City for All' within the New Indonesian Capital City: Smart and Green City Perspective. *Journal of Regional and City Planning*, *34*, 232–247.

Kamal, M. (2022). Prospects for the New Capital City Policy in Law and Economic Perspectives. *Substantive Justice International Journal of Law*, *5*(1), Article 1.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Kusno, A. (2024). The road to Nusantara: Process, challenges and opportunities: edited by Julia M. Lau, Athiqah Nur Alami, Siwage Dharma Negara and Yanuar Nugroho, Singapore, ISEAS Publishing in collaboration with BRIN, Jakarta, 2023, xxvi+282 pp., $45.00 (pbk), ISBN 9789815104226. *South East Asia Research*, *32*(1), 115–118.

Mao, Y., Liu, Q., & Zhang, Y. (2024). Sentiment analysis methods, applications, and challenges: A systematic literature review. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, *36*(4), 102048.

Musu, C. A., Prasetyo, M. A., Adhie, A. J., Gustawinata, M. A., & Marwandy, M. I. (2022). Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil pada Aturannya. *IBLAM LAW REVIEW*, *2*(2), 79–97.

Nurkaidah, Anas, A., & Baharuddin, T. (2024). Implementation of environmental policies on the development of a new capital city in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2297764.

Perwira, I., Harijanti, S. D., Susanto, M., & Adhihernawan, M. Y. (2024). Capital city relocation in Indonesia: Compromise failure and potential dysfunction. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2345930.

Pusung, P., Warouw, F. F., Rotty, V., & Giroth, Lady. (2023). Mapping environmental problems in the new capital city of "Nusantara" as a foundation for sustainable development governance. *Environment and Social Psychology*, *9*.

Rifaid, R., Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN). *Journal of Governance and Public Policy*, *10*(3), Article 3.

Rodríguez-Ibánez, M., Casánez-Ventura, A., Castejón-Mateos, F., & Cuenca-Jiménez, P.-M. (2023). A review on sentiment analysis from social media platforms. *Expert Systems with Applications*, *223*, 119862.

Said, N. I., Hernaningsih, T., Sudinda, T. W., Yudo, S., Widayat, W., Plamonia, N., Santoso, A. D., Setiyono, Wahyono, H. D., Rifa, A., Setiadi, I., & Sulaeman, O. (2024). Forecasting and Sustainability of Raw Water Supply for Indonesia's New Capital. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(1).

Sensuse, D. I., Putro, P. A. W., Rachmawati, R., & Sunindyo, W. D. (2022). Initial Cybersecurity Framework in the New Capital City of Indonesia: Factors, Objectives, and Technology. *Information*, *13*(12), Article 12.

Subramanian, R. R., Akshith, N., Murthy, G. N., Vikas, M., Amara, S., & Balaji, K. (2021). A Survey on Sentiment Analysis. *2021 11th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)*, 70–75.

Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's new capital city: An in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, *11*(1), 2276415.

Tia, R. (2023, Juni 21). *Isu Pembangunan IKN di Media Berita Daring dan Sentimen Negatif yang Melingkupi*. https://analysis.netray.id/isu-pembangunan-ikn-dan-sentimen-negatifnya/

Trilatifah, W. (2022, Januari 26). *Kebelet Pindah Ibu Kota Baru & Polemik yang Mengiringinya*. https://analysis.netray.id/kebelet-pindah-ibu-kota-baru-polemik-yang-mengiringinya-2/

Van de Vuurst, P., & Escobar, L. E. (2020). Perspective: Climate Change and the Relocation of Indonesia's Capital to Borneo. *Frontiers in Earth Science*, *8*.

Yusuf, A. A., Roos, E. L., Horridge, J. M., & Hartono, D. (2023). Indonesian capital city relocation and regional economy's transition toward less carbon-intensive economy: An inter-regional CGE analysis. *Japan and the World Economy*, *68*, 101212.